



**SUMBER BERITA**

	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
X	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF   
  NETRAL   
  BAHAN PEMERIKSAAN   
  PERHATIAN KHUSUS

**Kasus Lahan Tunggu Perhitungan KN**

**BENGKULU, BE** - Kasus korupsi penyimpangan lahan Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu di Kelurahan Bentiring, 2015, hanya tinggal menunggu hasil perhitungan kerugian negara dari BPKP Provinsi Bengkulu. Salah satu saksi kasus korupsi lahan Pemkot, Fahrizal berharap agar perhitungan kerugian negara segera diselesaikan sehingga penyidik Kejari Bengkulu bisa melanjutkan penyidikan 4 kasus ke tahap berikutnya.

Fahrizal mantan Ketua RT 13 Bentiring tersebut mengatakan jika masyarakat yang tinggal disekitaran Lahan Pemkot memiliki harapan

yang sama dengan dirinya.

"Kita berharap, BPKP segera menyelesaikan perhitungan kerugian negara," jelas Fahrizal.

Terlebih lagi berdasarkan pernyataan dari Kejari Bengkulu di berita bahwa seluruh bukti terkait kasus tersebut sudah dikumpulkan, saksi sudah diperiksa seluruhnya. Artinya kasus hanya tinggal menunggu kerugian negara.

"Kita berharap agar cepat selesai, sehingga ada oknum yang bertanggung jawab atas kasus ini," imbuhnya.

Sebelumnya, Kajari Bengkulu, Emilwan Ridwan SH MH mengatakan, seluruh

saksi sudah dimintai keterangan oleh penyidik Pid-sus Kejari Bengkulu. Bahkan pemberkasan kasus korupsi tersebut sudah hampir selesai. Kapan tersangka akan ditetapkan, Kejari Bengkulu belum bisa memberikan jawaban terkait kapan tersangka ditetapkan.

"Januari 2020 semoga ada perkembangan positif," im-buh Kajari. Beberapa fakta kasus penyimpangan lahan pemkot diantaranya, lahan seluas 62 hektar lebih dibebaskan oleh tim 9 tahun 1995 lalu. Saat itu lahan tersebut dibeli menggunakan APBD Pemkot Bengkulu tahun 1995 Rp 150 juta. Tujuan lahan

dibebaskan untuk dibangun perumahan ASN Pemkot Bengkulu. Luas lahan yang dibangun perumahan ASN sekitar 12 hektar, dengan jumlah rumah yang dibangun mencapai 610 unit. Tetapi beberapa rumah tidak ditempati karena rusak akibat gempa bumi, hanya 569 rumah yang ditempati. Kemudian tahun 2015, oknum masyarakat tidak bertanggung jawab menjual lahan seluas 8,6 hektar kepada pengembang perumahan.

Diduga lahan tersebut dijual mulai dari Rp 150 juta sampai Rp 500 juta. Saat ini lahan seluas 8,6 hektar sudah berdiri perumahan. (167)